



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI UMKM RI
(BIDANG PERINDUSTRIAN, PARIWISATA, UMKM, EKONOMI KREATIF,
DAN SARANA PUBLIKASI)**

Rapat Ke	: 15
Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Sidang	: II
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari, Tanggal	: Senin, 17 November 2025
Pukul	: 14.00 – 18.20 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Ir. Lamhot Sinaga (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F.PG)
Sekretaris Rapat	: Eguh Setiawan., S.IP. / Kabagset Komisi VII DPR-RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Acara	: Pembahasan Penjaminan Kredit KUR bagi UMKM.
Hadir	: Anggota Komisi VII DPR-RI: 21 orang dari 41 Anggota Komisi VII DPR-RI dan kuorum 8 fraksi dari 8 Fraksi. Hadir: 1. Menteri UMKM RI dan Jajaran; 2. Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia; 3. Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada pukul 14.35 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada hari Senin, 17 November 2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ir. Lamhot Sinaga (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F. PG).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI menerima dan mengapresiasi penjelasan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI mengenai:
 - a. Target Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025: alokasi plafon sebesar Rp286,61 triliun, target debitur baru sebanyak 2,34 juta debitur, target debitur graduasi sebanyak 1,17 juta debitur, dan target penyaluran sektor produksi sebesar 60%.
 - b. Realisasi penyaluran KUR sampai dengan 15 November 2025: Rp238,7 triliun atau sebesar 83.2%, jumlah debitur sebanyak 4.047.900 debitur, debitur baru sebanyak 2.252.511 debitur atau sebesar 96.38%, debitur graduasi sebanyak 1.321.830 debitur atau sebesar 112%, dan penyaluran sektor produksi sebesar 60.7%.
2. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama PT Askrindo dan Direktur Utama PT Jamkrindo mengenai kinerja penjaminan/pertanggungan KUR tahun 2015 sampai dengan September 2025, prosedur penjaminan/pertanggungan dan pengajuan klaim, tantangan, dan masukan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas penjaminan KUR.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian UMKM RI dan/atau lembaga penjamin KUR (PT Askrindo dan PT Jamkrindo) untuk menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, antara lain:
 - a. Meningkatkan realisasi debitur KUR baru dan debitur graduasi dalam rangka mengoptimalkan pemerataan kredit bagi UMKM.
 - b. Memaksimalkan pengawasan dan pendampingan agar penyaluran KUR diprioritaskan untuk sektor produksi dan padat karya.
 - c. Meningkatkan tata kelola penjaminan KUR yang lebih transparan dan akuntabel berbasis data yang akurat.
 - d. Memastikan penyaluran KUR di bawah Rp100 juta bagi UMKM tidak dipersyaratkan adanya agunan.
 - e. Mempertimbangkan untuk melibatkan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) dalam penyaluran KUR.
 - f. Mengoptimalkan penyaluran KUR untuk UMKM sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.
4. Komisi VII DPR RI meminta Kementerian UMKM RI, PT Askrindo, dan PT Jamkrindo untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Rapat Kerja hari ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.20 WIB.

MENTERI UMKM RI,

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
WAKIL KETUA,**

TTD

TTD

MAMAN ABDURRAHMAN

Ir. LAMHOT SINAGA